



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOCHAMAD ERWIN
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 420077

II. DATA HARTA

- A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.710.560.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
 2. Tanah Seluas 1.252 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 365.560.000
 3. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 685.000.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 231.500.000
1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
 2. MOTOR, YAMAHA BYSON Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
 3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
 4. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 FI Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 283.000.000
- D. SURAT BERHARGA** Rp. ----
- E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 54.078.252
- F. HARTA LAINNYA** Rp. 152.000.000



Sub Total	Rp.	2.431.138.252
III. HUTANG	Rp.	647.182.452
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.783.955.800

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.